



Profil Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun 2010-2011

<https://litau>



Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012

Profil Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun 2010-2011

s-go.id

**PROFIL KETENAGAKERJAAN JAWA BARAT
TAHUN 2010-2011**

No. Publikasi	: 32520.1204
Katalog BPS:	: 2303003.32
Ukuran Buku	: 18,2 cm x 25,5 cm
Jumlah Halaman	: xi+45 Halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Penyunting	: Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan oleh	: BPS Provinsi Jawa Barat
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya	

Penyusun
Situasi Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun
2010-2011

Pengarah : Drs. H. Lukman Ismail, MA

Editor : Dyah Anugrah Kuswardani, MA

Penulis : Ir. Amilija Nurjuliani
Dwi Astuty Handayani, MP.
Dra. Mujihartini
Partinah

Pengolah Data/Penyiapan Draft : Dwi Astuty Handayani, MP.
Partinah

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga publikasi “Profil Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun 2010-2011“ dapat terwujud. Publikasi ini menyajikan berbagai informasi mengenai ketenagakerjaan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2010-2011, mencakup data dan analisis mengenai Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja, Pengangguran, dan informasi pekerja. Data yang digunakan adalah data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010-2011 beserta informasi pendukung lainnya.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data bagi para pengambil kebijakan untuk menyikapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat, sebagai salah satu indikator pendukung perencanaan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan ke depan, serta para pengguna data pada umumnya.

Kritik dan saran bagi penyempurnaan publikasi ini dimasa di masa yang akan datang, sangat diharapkan. Kepada seluruh pihak yang membantu terlaksananya publikasi ini, ucapan terimakasih diberikan. Semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, November 2012

BPS Provinsi Jawa Barat

Kepala



Gema Purwana, SE, M.Si
NIP. 195510031977031001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Penyusunan Profil Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun 2010-2011	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sistematika Penyajian	4
Bab II	
Kondisi Angkatan Kerja Jawa Barat	6
2.1 Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja	6
2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	8
Bab III	
Pengangguran dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	12
3.1 Pengangguran Terbuka	13
3.2 Pengangguran Terdidik	15
3.3 Setengah Pengangguran	18
3.4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	22
Bab IV	
Karakteristik Penduduk Yang Bekerja	
4.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama	24
4.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama	28
4.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	32
Bab V	
Pekerja Formal dan Informal	36
Bab VII	
6.1 Kesimpulan	40
6.2 Saran	42
Daftar Pustaka	

Daftar Tabel

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah serta Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	7
Tabel 2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	8
Tabel 2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2011	10
Tabel 3.1	Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	16
Tabel 3.2	Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	18
Tabel 3.3	Tingkat Pekerja Tak Penuh Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	21
Tabel 3.4	Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	23
Tabel 4.1	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	25
Tabel 4.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	25
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2009-2010	27
Tabel 4.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	28
Tabel 4.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	29
Tabel 4.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2010-2011	32

	Halaman	
Tabel 4.7	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	33
Tabel 4.8	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	34
Tabel 4.9	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2010-2011	35
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Formal dan Informal) dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	37
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Formal dan Informal) dan Status wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	38

Daftar Gambar

	Halaman	
Gambar 3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	14
Gambar 3.2	Tingkat Pekerja Tak Penuh Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	18
Gambar 4.1	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011	26
Gambar 4.2	Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat Tahun 2011, disebutkan bahwa berdasarkan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Jawa Barat tetap dihantui berbagai tantangan yang memerlukan respon secara komprehensif melalui aksi nyata, di antaranya adalah penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Keadaan lapangan pekerjaan akan menentukan proses pemulihan perekonomian Jawa Barat yang pada akhirnya dapat menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat menikmati pemulihan ekonomi, karena mereka tidak memiliki pendapatan untuk dibelanjakan. Karena itu, lapangan kerja bukan hanya merupakan mesin penggerak pembaruan ekonomi, tetapi juga sebuah hasil dari proses pemulihan ekonomi. Begitu pentingnya masalah kemiskinan dan pengangguran, sehingga Gubernur mempunyai komitmen untuk menyediakan satu juta kesempatan kerja hingga tahun 2013, melalui berbagai perluasan peluang kerja multi sektor baik formal maupun non formal.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2011 menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan Agustus 2010. Hal ini diindikasikan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 10,33 persen pada Agustus 2010 menjadi 9,83 persen pada Agustus

2011. Penyerapan tenaga kerja tersebut didorong oleh perekonomian yang semakin membaik khususnya pada beberapa sektor ekonomi utama (BI, 2011).

Kajian ini juga memperlihatkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, indikasinya adalah adanya peningkatan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat dari 99,08 pada tahun 2010 menjadi 104,90 pada tahun 2011 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 72,29 pada tahun 2010 menjadi 72,73 pada tahun 2011.

Meski secara umum terjadi perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta perbaikan kondisi penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi masih melihat sektor ketenagakerjaan belum menjadi sektor yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah. Minimnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sektor ini terlihat dari hasil pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi yang rata-rata secara nasional hanya mencapai nilai 49 (Pikiran Rakyat, 20 Juli 2011).

Adanya berbagai masalah dalam pengawasan ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial disinyalir menjadi penyebab utama rendahnya nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan di seluruh provinsi di Indonesia. Karenanya Pemerintah menargetkan adanya peningkatan indeks tersebut pada tahun- yang akan datang agar tercipta situasi ketenagakerjaan yang kondusif di setiap wilayah.

Informasi yang diungkapkan di atas, memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat, akan terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Kisaran pembahasan yang selalu berputar pada permasalahan klasik seperti *supply and demand* pekerja, persebaran lapangan usaha yang tidak merata antar daerah, upah dan gaji, hingga kebutuhan pemenuhan hak-hak dan perlindungan

bagi pekerja, memperlihatkan permasalahan ketenagakerjaan hingga kini belum sepenuhnya mampu diatasi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD) Jawa Barat tahun 2008-2013, dituntut untuk mampu menjawab serta mengatasi permasalahan pembangunan yang ada serta dapat menjadi panduan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Ditambah posisi Jawa Barat sebagai *agent of development* (agen pembangunan) mendudukkan provinsi ini sebagai subyek pendorong penting bagi pertumbuhan pembangunan secara Nasional.

Tuntutan menjadi subyek penting pertumbuhan Indonesia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Jawa Barat. Titik berat pembangunan Jawa Barat yang tertuang dalam 5 target sasaran yang ditetapkan sesuai misi pembangunan Jawa Barat yaitu “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, mencatat keinginan untuk mewujudkan **Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing** sebagai target sasaran pertama pembangunan.

Peningkatan kualitas SDM bisa jadi sulit diwujudkan jika Pemerintah Daerah tidak memiliki informasi dasar yang jelas mengenai penduduk yang sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Program-program pembangunan yang tidak berdasar pada informasi yang tepat dan akurat, ditakutkan hanya akan menjadi penghamburan anggaran daerah serta berakhir sebagai program tidak tepat guna dan tepat sasaran.

1.2 Tujuan

Analisis Situasi Ketenagakerjaan Jawa Barat 2010-2011 secara umum bertujuan memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat, baik dari dimensi lapangan usaha yang ada maupun

dimensi pekerja, melihat dinamika perubahan dalam rentang waktu satu tahun, serta membuat analisis sederhana tentang keterkaitan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Informasi yang dikumpulkan pada publikasi ini sedikit banyak diharapkan akan mampu membantu para *stakeholders* untuk melihat, mengevaluasi, serta menjadi pijakan dalam penentuan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam beberapa tahun ke depan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Publikasi ini secara khusus memberikan informasi angkatan kerja, penganggur, serta struktur pekerja di Jawa Barat. Permasalahan pokok yang akan dianalisis antara lain:

1. Gambaran angkatan kerja Jawa Barat.
2. Melihat struktur pekerja Jawa Barat menurut lapangan pekerjaan, status dan jenis pekerjaan.
3. Menelaah keterkaitan antara pendidikan dan lapangan usaha serta keterkaitan pendidikan dan jenis pekerjaan pekerja Jawa Barat.
4. Memberikan saran dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam rangka mengantisipasi masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat

1.3 Sistematika Penyajian

Analisis Situasi Ketenagakerjaan Jawa Barat 2010 – 2011 dibagi ke dalam 7 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sistematika Penyajian

Bab II Kondisi Angkatan Kerja Jawa Barat

- 2.1. Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

	2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
Bab III	Pengangguran dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
	3.1. Pengangguran Terbuka
	3.2. Pengangguran Terdidik
	3.3. Pekerja Tak Penuh
	3.4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Bab IV	Karakteristik Penduduk yang Bekerja
	4.1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.
	4.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.
	4.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.
Bab V	Pekerja Formal dan Informal
Bab VI	Ketenagakerjaan Kaum Muda
Bab VII	7.1. Kesimpulan
	7.2. Saran
	Daftar Pustaka
	Lampiran Tabel

BAB 2

KONDISI ANGKATAN KERJA JAWA BARAT

2.1. Angkatan Kerja Dan Tenaga Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang termasuk dalam kelompok usia kerja (15 tahun dan lebih). Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Secara absolut, jumlahnya relatif berfluktuasi pada rentang normal dari tahun ke tahun. Komposisi jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan sangat mudah berubah. Tidak hanya karena aspek kondisi ekonomi, namun juga situasi politik dan sosial, baik kondisi lokal Jawa Barat maupun kondisi Indonesia di lingkup global.

Hasil Sakernas 2011 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat dibandingkan tahun 2010. Angkatan kerja tahun 2011 berjumlah 19.356.624 orang dengan komposisi 12.998.300 laki-laki dan 6.358.324 perempuan. Tahun 2010, jumlah angkatan kerja Jawa Barat ada sebanyak 18.893.835 jiwa dengan komposisi 12.712.051 laki-laki dan 6.181.784 perempuan. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 462.789 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45 persen. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1.

Peningkatan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat secara dominan disumbang oleh peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan. Selama rentang waktu satu tahun tersebut, jumlah angkatan kerja perempuan dan laki-laki sama-sama meningkat, namun peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja perempuan sebesar 2,86 persen,

lebih besar daripada laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki yang sebesar 2,25 persen.

Tabel 2.1. Jumlah serta Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010 – 2011

Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Penduduk Bekerja		
	2010	2011	LPP 2010-2011	2010	2011	LPP 2010-2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	12.712.051	12.998.300	2,25	11.487.607	11.739.481	2,19
Perempuan	6.181.784	6.358.324	2,86	5.454.837	5.715.300	4,77
Total	18.893.835	19.356.624	2,45	16.942.444	17.454.781	3,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Berdasarkan Tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Jawa Barat yang bekerja mengalami peningkatan selama setahun terakhir. Pada tahun 2010, jumlah penduduk bekerja di Jawa Barat sebanyak 16.942.444 terdiri dari 11.487.607 tenaga kerja laki-laki dan 5.454.837 perempuan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk yang bekerja bertambah, menjadi 17.454.781 orang. Dari jumlah tenaga kerja tersebut, tenaga kerja laki-laki sebanyak, 11.739.481 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 5.715.300 orang. Pada rentang waktu satu tahun terjadi pertumbuhan tenaga kerja laki-laki sebesar 2,19 persen dan pertumbuhan tenaga kerja perempuan sebesar 4,77 persen.

Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja diikuti dengan penurunan jumlah penduduk yang menganggur atau mencari pekerjaan. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja serta penurunan jumlah penduduk yang menganggur menunjukkan semakin baiknya penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha yang disebabkan oleh karena hasil perluasan (diversifikasi) usaha, permintaan tenaga

kerja di sektor usaha yang sudah ada, maupun hasil dari adanya pembukaan sektor usaha yang baru. Kenaikan jumlah penduduk yang bekerja cukup menggembirakan mengingat komitmen Pemerintah Jawa Barat untuk menyediakan satu juta lapangan kerja hingga tahun 2013.

2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Akibat jumlah pengangguran yang tidak terserap pada lapangan pekerjaan dapat berimplikasi terhadap perubahan berbagai dimensi sosial masyarakat seperti meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas.

Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK.

Tabel 2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat, Tahun 2010-2011

Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	81,42	42,38	62,15	81,38	42,36	62,15
Perdesaan	84,42	40,24	62,64	84,69	39,77	62,51
Total	82,84	41,37	62,38	82,51	41,47	62,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

TPAK Jawa Barat pada tahun 2010 sebesar 62,38 persen sedangkan TPAK pada tahun 2011 sebesar 62,27 persen. TPAK di atas 60 persen ini dapat diartikan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Jawa Barat yang berada pada usia kerja telah siap secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, baik yang sudah aktif bekerja, maupun yang saat ini sementara tidak bekerja karena sesuatu hal, dan yang sedang mencari pekerjaan.

Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Jawa Barat. Selama ini TPAK perempuan selalu lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki. Jumlah angkatan kerja laki-laki dalam dua tahun terakhir masih berada pada kisaran lebih besar dari dua kali lipat jumlah angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam pangsa pasar kerja jauh lebih besar dibandingkan perempuan.

Perbedaan komposisi angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Jawa Barat dapat dimaklumi karena norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki untuk memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumahtangga. Perempuan memegang peranan sebagai pendamping suami, mengurus keperluan rumahtangga dan keluarga. Perbedaan peran ini mengakibatkan posisi perempuan dalam masyarakat bersifat sekunder, berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, di mana perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam angkatan kerja.

Tabel 2.2 di atas memperlihatkan, bahwa ada perbedaan TPAK di daerah perkotaan dan perdesaan. Kondisi TPAK di perkotaan tahun 2011 tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2010, yaitu 62,15 persen sedangkan TPAK di perdesaan pada tahun 2011 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2010, yakni dari 62,64 persen pada tahun 2010 menjadi 62,51 persen pada tahun 2011.

Dilihat dari Tabel 2.3, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kabupaten/kota yang relatif cukup tinggi pada tahun 2011 yaitu, Kabupaten Bekasi (64,12 persen), Kota Bekasi (63,79 persen), Kota Depok (63,18 persen) dan Kabupaten Indramayu (63,09 persen).

Tabel 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2010-2011

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bogor	83,70	34,00	59,60	82,21	41,96	62,54
Kab. Sukabumi	83,70	33,43	59,02	82,68	40,71	62,05
Kab. Cianjur	85,23	38,84	62,90	82,83	40,83	62,65
Kab. Bandung	85,44	44,50	65,32	81,81	41,97	62,20
Kab. Garut	79,50	32,92	56,37	81,93	39,67	60,94
Kab. Tasikmalaya	85,13	54,18	69,40	83,29	39,59	61,18
Kab. Ciamis	84,03	51,65	67,45	83,54	40,94	61,66
Kab. Kuningan	81,06	40,28	60,55	83,12	41,02	61,96
Kab. Cirebon	79,10	37,10	58,68	81,00	41,53	61,73
Kab. Majalengka	85,76	48,56	66,96	83,54	39,75	61,48
Kab. Sumedang	83,26	47,41	65,17	82,53	40,20	61,18
Kab. Indramayu	83,45	41,73	63,22	83,93	41,04	63,09
Kab. Subang	84,67	41,02	62,91	83,24	40,80	62,24
Kab. Purwakarta	82,70	45,42	64,50	82,37	41,27	62,30
Kab. Karawang	85,51	37,14	62,07	82,59	41,64	62,81
Kab. Bekasi	86,97	45,93	66,85	85,04	42,42	64,12
Kab. Bandung Barat	80,29	30,73	55,97	82,50	40,78	62,04
Kota Bogor	82,68	47,98	65,56	80,75	42,43	61,92
Kota Sukabumi	79,18	37,38	58,50	80,77	41,70	61,42
Kota Bandung	77,36	43,78	60,73	80,08	42,24	61,40
Kota Cirebon	76,64	45,18	60,69	81,33	42,08	61,67
Kota Bekasi	80,96	43,14	62,18	83,58	43,66	63,79
Kota Depok	79,67	47,81	63,83	82,69	43,18	63,18
Kota Cimahi	80,81	45,21	63,05	81,76	42,41	62,19
Kota Tasikmalaya	82,28	43,94	63,18	80,92	41,08	61,15
Kota Banjar	79,37	34,97	56,68	79,94	40,76	59,97
Jawa Barat	82,84	41,37	62,38	82,51	41,47	62,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Data Sakernas memperlihatkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di beberapa daerah kabupaten/kota cukup tinggi, Lima daerah yang memiliki TPAK perempuan tertinggi pada tahun 2011 yaitu, Kota Bekasi (43,66 persen), Kota Depok (43,18 persen), Kota Bogor (42,43 persen), Kabupaten Bekasi (42,42 persen), dan Kota Cimahi (42,41 persen),

Kontribusi pekerja perempuan yang cukup tinggi di daerah kota seperti Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Cimahi dianggap relatif wajar karena seiring dengan tingginya pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, maupun pola pikir perempuan yang semakin maju, menyebabkan semakin banyak perempuan yang berlomba-lomba masuk ke dalam pasar kerja, terutama mengisi peluang kerja di Ibukota. Selain itu, ketiga wilayah tersebut berada di seputaran pusat industri di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi. Kota Cimahi juga bertetangga dengan Kota Bandung yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Jawa Barat.

BAB 3

PENGANGGURAN DAN PERSENTASE KESEMPATAN KERJA (TKK)

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Pengangguran juga diakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam persentase kegiatan perekonomian. Sebagai ilustrasi, pada saat kegiatan ekonomi mengalami kemajuan, maka perusahaan akan merekrut banyak pekerja untuk dipekerjakan agar produktivitas perusahaan meningkat, namun seiring dengan menurunnya kegiatan perekonomian, maka perusahaan akan mengurangi pegawai untuk mengurangi kerugian.

Perkembangan perekonomian dari sistem ekonomi tradisional menjadi modern juga merupakan pemicu naiknya jumlah pengangguran. Penggunaan alat-alat yang lebih canggih seperti traktor untuk membajak sawah membuat para pekerja yang biasanya dipekerjakan di sawah menjadi berkurang. Semakin modern teknik untuk memproduksi dengan menggunakan mesin, semakin tinggi pula jumlah penganggur. Dengan adanya mesin ini, biaya produksi lebih hemat bagi produsen karena tak perlu membayar gaji banyak pekerja sehingga perusahaan tak memerlukan banyak pekerja.

Pengangguran berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berakibat timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurunnya pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya persentase kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga

dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Persentase pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya PDB dan pendapatan per kapita suatu negara.

Kondisi pengangguran di Jawa Barat dan perkembangannya antar waktu akan dibahas dalam sub bab ini. Beberapa aspek pengangguran yang akan dibahas dalam analisis ini antara lain adalah persentase pengangguran terbuka, persentase pengangguran terdidik, dan angka setengah pengangguran. Selain pengangguran, pada bab ini akan dibahas juga persentase kesempatan kerja di Jawa Barat.

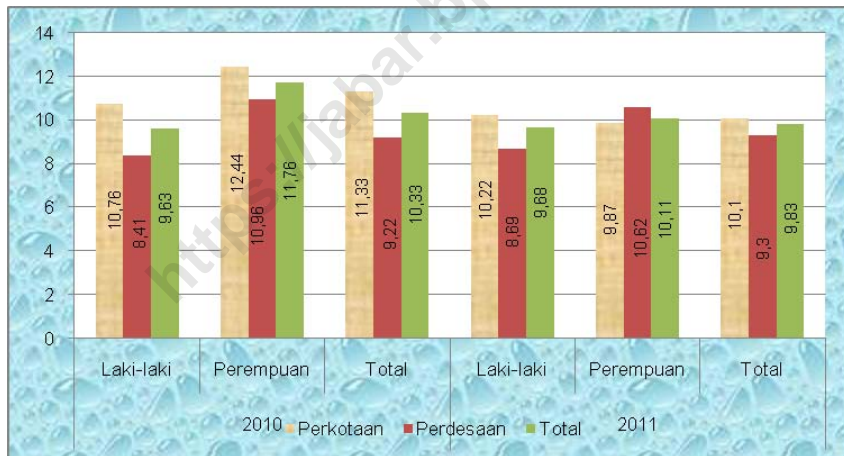
3.1 Pengangguran Terbuka

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Persentase Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Mengetahui jumlah pengangguran terbuka sangat berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Pengangguran terbuka umumnya terjadi pada penduduk usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern.. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang.

Pada Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa Persentase Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat menurut status wilayah dan jenis kelamin pada tahun 2010-2011. Seperti telah disebutkan di atas bahwa para pencari kerja umumnya mencari kerja di daerah-daerah yang industrinya lebih berkembang dan ini terjadi di daerah perkotaan, sehingga TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Masuknya angkatan kerja dari daerah perdesaan, dan banyaknya pencari kerja sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di daerah perkotaan, sementara kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, berakibat pada tingginya persentase pengangguran.

Gambar 3.1 Persentase Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, diolah

Tingginya TPT di daerah perkotaan juga disebabkan oleh ketidakberhasilan sektor industri di kota yang dipandang paling potensial dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan pola investasi yang padat modal dan sangat berpengaruh terhadap timbulnya pengangguran di daerah perkotaan. Sebagian dari program pembangunan di daerah perkotaan, khususnya usaha-usaha swasta lebih dititikberatkan pada program investasi padat modal. Investasi padat modal sendiri cenderung menggunakan teknologi

tinggi, dan mempersyaratkan sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan ini dengan persentase keahlian tertentu.

Jika dilihat menurut jenis kelamin TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, karena jumlah perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki, penduduk perempuan cenderung lebih memilih untuk berumah tangga. Persentase pengangguran laki-laki di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini diakibatkan banyaknya pencari kerja laki-laki dari perdesaan yang pindah ke perkotaan dengan harapan mendapat pekerjaan di kota, namun karena kualifikasi mereka tidak memenuhi untuk pasar kerja di kota, akhirnya mereka harus menganggur. Sementara untuk persentase pengangguran terbuka perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya perempuan di perdesaan yang pada akhirnya harus mencari kerja karena untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

3.2 Pengangguran Terdidik

Salah satu permasalahan berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah adanya pengangguran di kalangan orang-orang terdidik. Pengangguran terdidik adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Dengan adanya pengangguran terdidik, secara potensial dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Permasalahan yang timbul dengan adanya pengangguran terdidik ini antara lain adalah pemborosan sumber daya pendidikan, dan menurunnya penghargaan serta kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan program studi yang ada pada dunia pendidikan, sehingga para lulusan yang berasal dari jenjang pendidikan tertentu tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada. Faktanya lembaga pendidikan

di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu mendapat tambahan keterampilan yang memadai untuk membuka usaha. Disisi lain para penganggur terdidik lebih memilih pekerjaan yang formal dan hanya berminat pada pasar kerja yang mereka harapkan yaitu pada posisi yang nyaman, dapat fasilitas yang memadai dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar.

Tabel 3.1. Persentase Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Jenjang Pendidikan	2010			2011		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< SD	6,30	3,85	4,69	9,28	5,47	7,53
SD	7,57	6,01	6,57	6,47	5,58	6,03
SLTP	11,68	15,62	13,43	11,55	18,01	13,50
SLTA	14,17	18,63	15,20	13,00	19,74	13,93
PT	13,74	18,90	14,81	8,64	16,61	9,79
Total	11,33	9,22	10,33	10,10	9,30	9,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, diolah

Tabel 3.1. memperlihatkan persentase pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Barat periode tahun 2010 – 2011. Pada persentase pendidikan tidak/belum tamat SD, angka pengangguran di daerah pedesaan baik pada tahun 2010 maupun 2011 cenderung lebih rendah dibanding dengan perkotaan. Di daerah pedesaan masih banyak lapangan pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi, misalnya dalam pertanian maupun industri rumah tangga. Sementara di daerah perkotaan lowongan pekerjaan menuntut spesifikasi pendidikan tertentu. Pengangguran pada golongan berpendidikan SD di perkotaan juga lebih besar dibandingkan dengan angka pengangguran di pedesaan. Perbedaan angka pengangguran ini juga diduga karena struktur pekerjaan seperti apa yang dijelaskan sebelumnya yaitu masih banyak pekerjaan di desa yang tidak menuntut pendidikan tinggi, sehingga mereka masuk dalam golongan pekerja.

Kondisi berbeda terlihat pada pengangguran di persentase pendidikan SLTP. Angka pengangguran SLTP di pedesaan sebesar 15,62 (tahun 2010) dan 18,01 (tahun 2011), berbeda jauh jika dibandingkan dengan angka pengangguran di perkotaan yang hanya sebesar 11,68 (tahun 2010) dan 11,55 (tahun 2011). Tingginya angka pengangguran di pedesaan pada persentase pendidikan ini, bisa disebabkan karena mereka yang tinggal di pedesaan tidak mampu melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mereka memilih untuk mencari pekerjaan. Sementara di perkotaan cenderung lebih rendah karena penduduk di daerah perkotaan memilih untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak berstatus sebagai penganggur.

Pada persentase pendidikan SLTA, baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki angka pengangguran tertinggi dari seluruh persentase pendidikan yang ada. Hal ini terjadi karena pada golongan pendidikan ini banyak lulusan pendidikan menengah yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi namun belum terserap dalam lapangan kerja. Usia mereka masih tergolong muda dan merasa belum mempunyai kewajiban secara ekonomi terhadap keluarganya. Mereka mencari kerja hanya sebagai pengalihan kegiatan dari dunia pendidikan ke dunia kerja, belum sebagai suatu kewajiban atas tuntutan ekonomi. Mereka sangat selektif dalam mencari pekerjaan, sementara pada sektor yang mereka harapkan terjadi seleksi yang cukup ketat. Beberapa diantara mereka banyak yang memilih menganggur dan menanti pekerjaan yang diharapkan daripada asal bekerja.

Selama setahun terakhir, pada golongan berpendidikan Perguruan Tinggi (PT) terjadi penurunan angka TPT yaitu dari 14,81 pada tahun 2010 menjadi 9,79 pada tahun 2011. Meskipun mengalami penurunan, namun TPT Perguruan Tinggi masih terbilang tinggi. Pasar kerja yang tersedia masih tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Tabel 3.2 memperlihatkan persentase pengangguran menurut persentase pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Jawa Barat periode tahun 2010-2011. Persentase pengangguran pada jenjang pendidikan

SLTA lebih tinggi di banding jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dimungkinkan pada jenjang pendidikan tersebut banyak penduduk yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka harus mencari kerja.

Tabel 3.2. Persentase Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Jenjang Pendidikan	2010			2011		
	Laki-laki	Perem-puan	Total	Laki-laki	Perem-puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< SD	4,43	5,15	4,69	8,20	6,56	7,53
SD	6,16	7,49	6,57	5,75	6,65	6,03
SLTP	11,62	17,01	13,43	12,72	15,23	13,50
SLTA	14,29	17,38	15,2	13,87	14,06	13,93
PT	15,26	14,17	14,81	8,89	11,01	9,79
Total	9,63	11,76	10,33	9,68	10,11	9,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, diolah

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penganggur terdidik perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena sebagian perempuan lebih memilih untuk berumah tangga daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sementara setelah berumah tangga mereka masih membutuhkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu masih adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga, mengurus anak, dan suami. Faktor-faktor tersebut disinyalir sangat berpengaruh terhadap tingginya persentase pengangguran perempuan khususnya di Jawa Barat.

3.3 Pekerja Tak Penuh

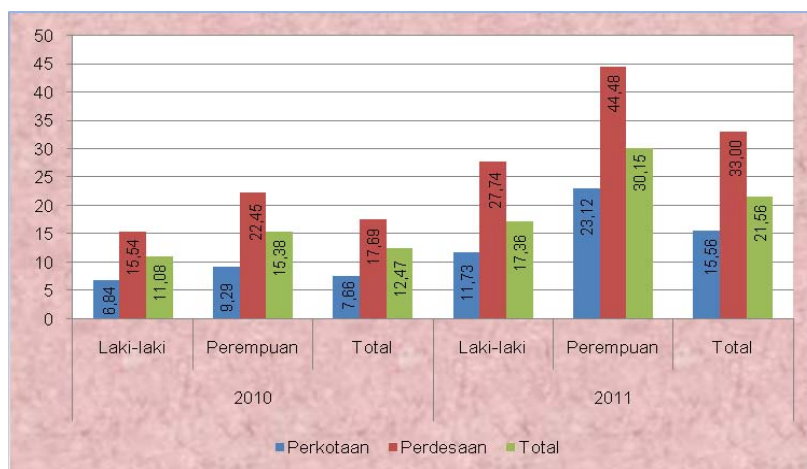
Pekerja tak penuh adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tak penuh

dulu disebut juga dengan setengah pengangguran. Proporsi jumlah pekerja tak penuh bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan persentase utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Pekerja tak penuh terdiri dari setengah penganggur (dulu disebut setengah penganggur terpaksa) dan pekerja paruh waktu (dulu setengah penganggur sukarela). Setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/per minggu, dan hingga masa pencacahan masih mencari pekerjaan. Pekerja paruh waktu adalah penduduk yang bekerja dibawah 35 jam/minggu, namun sudah tidak mencari pekerjaan lain. Pekerja paruh waktu tidak selamanya berkonotasi negatif, tetapi ada juga jenis pekerjaan yang bersifat profesional yang tidak membutuhkan jam kerja panjang, namun penghasilan yang memadai seperti konsultan, lawyer, dll.

Semakin tinggi persentase pekerja tak penuh maka semakin rendah persentase utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial.

Gambar 3.2. Persentase Pekerja Tak Penuh Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, diolah

Persentase pekerja tak penuh di Jawa Barat seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2. mengalami kenaikan sebesar 9,09 persen dari tahun sebelumnya. Tingginya persentase pekerja tak penuh di duga karena banyaknya penduduk yang terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan pendidikan atau keahlian yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil menunggu kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Tingginya persentase pekerja tak penuh secara umum sejalan dengan naiknya angka pekerja tak penuh di daerah perdesaan. Banyaknya penduduk perdesaan yang bekerja pada sektor-sektor informal dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu berpengaruh terhadap tingginya persentase pekerja tak penuh di Jawa Barat.

Persentase pekerja tak penuh perempuan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan lebih tinggi dibanding laki-laki. Seperti kita ketahui pada umumnya perempuan bekerja tidak terlalu banyak tuntutan. Hal ini disebabkan karena perempuan bekerja bukan sebagai penopang utama keluarga, namun untuk menambah pendapatan rumah tangga. Banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal seperti industri-industri rumah tangga yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu, bahkan sebagian dari mereka memang lebih memilih untuk bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu, dikarenakan mereka juga harus mengurus rumah tangga. Faktor-faktor inilah yang menjadikan tingginya persentase pekerja tak penuh perempuan di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pekerja tak penuh laki-laki.

Persentase pekerja tak penuh menurut kabupaten/kota terlihat pada tabel 3.3. Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 memiliki angka persentase pekerja tak penuh paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya, naik sebesar 5,68 persen dari tahun sebelumnya. Delapan kabupaten lainnya juga memiliki angka persentase pekerja tak penuh yang cukup tinggi yaitu kabupaten Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang,

dan Purwakarta memiliki angka pekerja tak penuh yang cukup tinggi yaitu di atas 15 persen.

Tabel 3.3. Persentase Pekerja Tak Penuh Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Kabupaten/Kota (1)	2010			2011		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)	Laki-laki (5)	Perempuan (6)	Total (7)
1. Kab. Bogor	8,63	11,76	9,49	13,11	9,65	11,42
2. Kab. Sukabumi	19,15	17,85	18,79	23,38	15,06	19,29
3. Kab. Cianjur	16,21	23,22	18,18	27,81	19,58	23,86
4. Kab. Bandung	10,8	14,34	11,94	11,01	9,47	10,25
5. Kab. Garut	17,05	26,03	19,61	20,15	21,6	20,87
6. Kab. Tasikmalaya	15,69	31,00	21,68	24,66	18,73	21,66
7. Kab. Ciamis	15,71	19,70	17,26	19,36	17,12	18,21
8. Kab. Kuningan	11,29	18,32	13,55	16,07	16,41	16,24
9. Kab. Cirebon	11,65	18,88	13,76	10,07	12,93	11,47
10. Kab. Majalengka	14,9	19,54	16,63	19,9	16,96	18,42
11. Kab. Sumedang	9,46	17,88	12,54	20,69	15,73	18,19
12. Kab. Indramayu	17,77	22,44	19,24	15,9	12,57	14,28
13. Kab. Subang	13,79	16,29	14,62	18,06	13,83	15,96
14. Kab. Purwakarta	13,98	19,36	15,83	15,83	15,13	15,49
15. Kab. Karawang	17,14	18,45	17,51	14,47	12,19	13,37
16. Kab. Bekasi	5,81	9,79	7,14	6,78	10,46	8,59
17. Kab. Bandung Barat	7,89	10,79	8,65	18,3	14,67	16,52
18. Kota Bogor	4,28	6,82	5,12	3,64	8,20	5,88
19. Kota Sukabumi	3,44	6,11	4,23	8,6	8,83	8,72
20. Kota Bandung	4,67	6,35	5,28	5,18	5,21	5,20
21. Kota Cirebon	5,86	10,20	7,42	7,36	6,30	6,83
22. Kota Bekasi	1,73	5,89	3,11	7,15	7,57	7,36
23. Kota Depok	3,38	6,70	4,65	6,59	7,29	6,93
24. Kota Cimahi	7,00	4,28	6,10	9,13	4,70	6,93
25. Kota Tasikmalaya	5,13	8,45	6,26	9,08	11,20	10,13
26. Kota Banjar	12,74	12,89	12,79	15,51	9,68	12,54
Total	11,08	15,38	12,47	14,33	12,51	13,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, diolah

Sementara dilihat dari jenis kelamin, persentase pekerja tak penuh perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini terjadi di hampir sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Jawa Barat lebih banyak bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu, dan dimungkinkan lebih banyak bekerja pada sektor informal.

3.4 Persentase Kesempatan Kerja (TKK)

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Indikator persentase kesempatan kerja merupakan komplemen dari persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat.

Tinggi rendahnya persentase kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa komponen pokok, seperti kondisi perekonomian, pertumbuhan penduduk, produktivitas/kualitas sumber daya manusia, persentase upah, dan struktur umur penduduk. Tabel 3.4. memperlihatkan persentase kesempatan kerja di Jawa Barat menurut kabupaten/kota periode tahun 2010-2011.

Persentase kesempatan kerja di Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya. Hampir di setiap kabupaten/kota memiliki persentase kesempatan kerja yang cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penyerapan terhadap angkatan kerja di Jawa Barat cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya persentase kesempatan kerja di Jawa Barat disebabkan semakin membaiknya roda perekonomian di Jawa Barat. Industri-industri yang ada semakin berkembang sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja baik tenaga kerja yang sudah lama maupun tenaga kerja baru.

Tabel 3.4. Persentase Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Kabupaten/Kota	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kab. Bogor	89,48	89,05	89,36	89,65	88,48	89,27
2. Kab. Sukabumi	90,32	89,55	90,11	90,92	89,70	90,53
3. Kab. Cianjur	90,80	84,03	88,79	90,35	88,76	89,85
4. Kab. Bandung	91,23	85,50	89,31	89,79	89,17	89,58
5. Kab. Garut	92,83	90,82	92,25	91,11	91,09	91,10
6. Kab. Tasikmalaya	93,11	90,85	92,21	91,51	92,14	91,71
7. Kab. Ciamis	95,52	93,89	94,88	91,77	89,94	91,14
8. Kab. Kuningan	93,84	88,72	92,13	91,63	89,70	90,99
9. Kab. Cirebon	89,07	82,43	87,03	90,14	89,17	89,82
10. Kab. Majalengka	93,13	95,99	94,18	91,76	93,12	92,20
11. Kab. Sumedang	92,31	91,75	92,10	91,80	92,30	91,96
12. Kab. Indramayu	89,38	87,30	88,71	90,08	89,48	89,89
13. Kab. Subang	90,41	93,07	91,28	91,22	90,22	90,90
14. Kab. Purwakarta	90,44	90,49	90,46	91,02	89,47	90,52
15. Kab. Karawang	86,57	81,56	85,12	90,07	89,67	89,94
16. Kab. Bekasi	91,34	90,23	90,97	89,46	90,29	89,73
17. Kab. Bandung Barat	87,65	84,11	86,69	90,60	90,65	90,62
18. Kota Bogor	86,72	75,87	82,80	89,77	89,53	89,69
19. Kota Sukabumi	86,70	79,27	84,35	89,99	89,72	89,90
20. Kota Bandung	86,80	89,70	87,83	89,76	89,47	89,66
21. Kota Cirebon	90,81	84,25	88,33	88,84	90,60	89,44
22. Kota Bekasi	89,60	84,62	87,89	89,52	89,45	89,49
23. Kota Depok	90,33	93,90	91,66	89,25	89,71	89,40
24. Kota Cimahi	90,43	79,20	86,41	89,72	89,60	89,68
25. Kota Tasikmalaya	92,28	90,99	91,84	90,13	92,31	90,86
26. Kota Banjar	93,74	94,99	94,13	93,19	92,12	92,82
Total	90,37	88,24	89,67	90,32	89,89	90,17

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, diolah

BAB 4

KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan/usaha merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Lapangan pekerjaan terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik Gas dan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa. Analisis yang dilakukan hanya akan memuat lima lapangan usaha terbesar yaitu; pertanian, industri, perdagangan dan jasa, sementara sisanya akan masuk pada sektor lainnya.

4.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sektor perdagangan menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di propinsi Jawa Barat, diikuti oleh sektor pertanian dan industri. Terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor perdagangan yaitu dari 24,83 persen pada tahun 2010 menjadi 26,06 pada tahun 2011. Begitu pula dengan sektor industri yang mengalami kenaikan 0,47 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka sektor industri, perdagangan dan jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Lapangan Usaha	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian	23,78	22,59	23,40	21,28	20,60	21,06
Industri	18,10	24,01	20,00	19,15	23,17	20,47
Perdagangan	22,06	30,67	24,83	22,05	34,39	26,09
Jasa Masyarakat	14,08	19,05	15,68	13,77	18,94	15,46
Lainnya	21,97	3,68	16,08	23,75	2,90	15,46
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Pada tahun 2011 ini sektor pertanian, jasa dan lainnya mengalami penurunan. Keadaan ini disebabkan oleh perpindahan pekerja ke sektor lain yang mengalami penambahan. Sektor jasa masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 2,53 persen di daerah perkotaan dan 0,33 persen di daerah perdesaan.

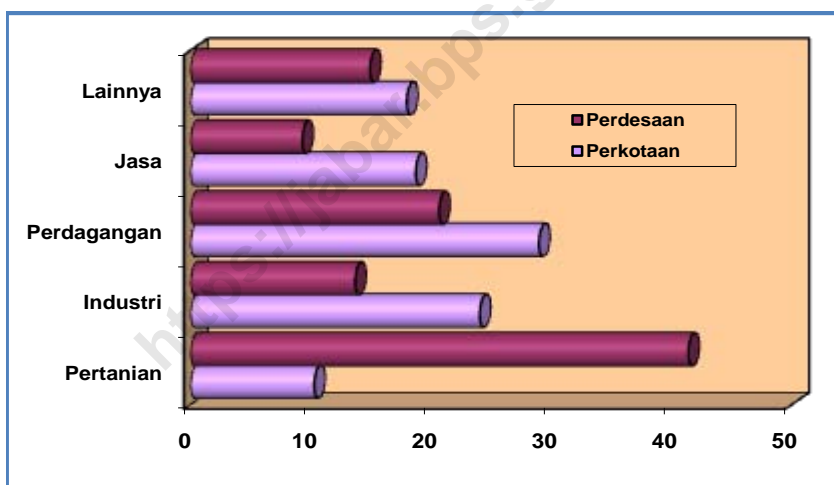
Tabel 4.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Lapangan Usaha	2010			2011		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Pertanian	7,59	40,56	23,40	10,28	41,40	21,06
Industri	24,05	15,61	20,00	24,05	13,69	20,46
Perdagangan	28,47	20,88	24,83	28,97	20,67	26,09
Jasa Masyarakat	21,26	9,63	15,68	18,73	9,30	15,46
Lainnya	18,62	13,33	16,08	17,98	14,93	16,92
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Sektor dominan di perdesaan adalah sektor pertanian dimana dominasinya sampai 40 persen lebih hal ini lebih disebabkan karena daerah perdesaan masih mengandalkan sektor pertanian sementara daerah perkotaan telah bertransformasi ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Lapangan pekerjaan menurut status wilayah di Jawa Barat pada tahun 2011 selaras dengan teori tersebut. Daerah perkotaan kebalikan dari daerah perdesaan, sektor pertanian menjadi sektor yang paling kecil proporsinya yaitu hanya 10,28 persen. Hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor yang paling dominan di perkotaan adalah perdagangan 28,97 persen di ikuti dengan sektor industri 24,05 persen dan sektor jasa 18,73 persen.

Gambar 4.1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011



Sebagian besar wilayah-wilayah kabupaten di Jawa Barat sampai dengan keadaan Agustus 2011, dari lima sektor lapangan pekerjaan ternyata sektor pertanian masih menjadi andalan penyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian diatas 25 persen. Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur adalah dua kabupaten yang tertinggi persentase penduduknya yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 40,50 persen. Hal ini dapat dipahami karena dua kabupaten tersebut merupakan sentra pertanian padi dan palawija. Di kabupaten Tasikmalaya sebagian besar

penduduknya bekerja di sektor industri yaitu sebesar 36,81 persen, sedangkan kota Bekasi di sektor jasa sebesar 32,05 persen dan untuk kota Cirebon sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perdagangan yaitu mencapai 49,27 persen.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2011

No.	Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama					Jumlah
		Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
1	Kab.Bogor	12,92	28,42	26,63	14,05	17,98	100,00
2	Kab.Sukabumi	28,27	20,57	22,65	7,73	20,78	100,00
3	Kab.Cianjur	40,50	5,26	21,90	14,75	17,59	100,00
4	Kab.Bandung	20,01	37,84	17,21	10,37	14,57	100,00
5	Kab.Garut	40,50	8,82	21,86	15,97	12,86	100,00
6	Kab.Tasikmalaya	30,43	26,18	18,48	10,63	14,29	100,00
7	Kab.Ciamis	29,91	20,98	25,66	10,61	12,84	100,00
8	Kab.Kuningan	31,16	11,48	30,24	10,57	16,55	100,00
9	Kab.Cirebon	31,86	8,89	38,68	8,17	12,40	100,00
10	Kab.Majalengka	35,95	13,39	20,08	13,77	16,81	100,00
11	Kab.Sumedang	29,05	13,06	22,90	16,12	18,87	100,00
12	Kab.Indramayu	38,55	6,45	29,45	13,03	12,51	100,00
13	Kab.Subang	38,05	14,52	27,03	8,54	11,86	100,00
14	Kab.Purwakarta	22,60	19,56	20,97	9,11	27,75	100,00
15	Kab.Karawang	19,83	21,16	33,08	12,27	13,67	100,00
16	Kab.Bekasi	11,23	37,57	22,69	15,54	12,97	100,00
17	Kab.Bandung Barat	26,36	16,24	19,36	15,82	22,23	100,00
18	Kota Bogor	1,20	15,56	28,83	29,06	25,35	100,00
19	Kota Sukabumi	5,01	15,51	32,73	25,97	20,78	100,00
20	Kota Bandung	0,33	24,80	36,44	22,74	15,68	100,00
21	Kota Cirebon	-	9,70	49,27	21,78	19,25	100,00
22	Kota Bekasi	0,34	20,77	23,19	32,05	23,65	100,00
23	Kota Depok	2,16	11,74	34,63	27,50	23,98	100,00
24	Kota Cimahi	1,32	28,31	29,04	23,52	17,82	100,00
25	Kota Tasikmalaya	8,77	36,81	24,26	15,35	14,81	100,00
26	Kota Banjar	10,03	22,59	26,56	20,54	20,29	100,00
	Jawa Barat	21,06	20,46	26,09	15,46	16,92	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2011, data diolah

4.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Berdasarkan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 maka Jenis pekerjaan biasanya dibagi menjadi: Tenaga profesional, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, Tata usaha, Tenaga usaha penjualan, Tenaga usaha jasa, Tenaga usaha pertanian, Tenaga produksi, operator, pekerja kasar, dan lainnya. Tiga kategori yang disebut pertama dimasukkan dalam pekerjaan *skilled*, Kategori lain dalam analisis termasuk dalam pekerjaan yang *unskilled*.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Jenis Pekerjaan	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	5,26	8,83	6,41	5,15	8,39	6,21
2	1,34	0,67	1,12	1,55	0,81	1,31
3	5,33	5,88	5,51	5,13	5,80	5,35
4	19,34	28,64	22,34	19,54	31,48	23,45
5	4,57	8,37	5,79	5,22	9,14	6,50
6	23,49	22,30	23,11	20,81	20,51	20,71
7/8/9	39,93	25,26	35,20	41,99	23,80	36,03
Lainnya	0,75	0,05	0,53	0,63	0,06	0,44
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Keterangan:

1. Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi
2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. T U Tani, Kebun, Ternak², Ikan, Hutan Dan Perburuan
- 7/8/9. Tenaga Produksi, Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar
- X/00. Lainnya

Komposisi jenis pekerjaan utama penduduk di propvinsi Jawa Barat pada tahun 2011 ini adalah tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar, ini

berarti tenaga kerja di Jawa Barat sebagian besar masih merupakan pekerja *unskilled* yang artinya untuk memasuki pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian. Namun demikian secara umum pekerjaan yang memerlukan keterampilan (*skilled*) mengalami kenaikan di tahun 2011 dibandingkan dengan 2010. Tenaga profesional mengalami peningkatan sebesar 1,31 persen, kepemimpinan dan ketatalaksanaan mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen sementara Tata usaha mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen.

Hal yang cukup menarik adalah Persentase penduduk perempuan pada jenis pekerjaan yang memerlukan keterampilan lebih tinggi dari pada tenaga kerja laki-laki, terutama untuk sektor tenaga usaha penjualan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dikuasai oleh pekerja laki-laki sebesar 41,99 persen dibanding tenaga kerja perempuan sebesar 23,80 persen.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Jenis *) Pekerjaan	2010			2011		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	8,74	3,88	6,41	7,65	3,48	6,21
2	1,59	0,61	1,12	1,70	0,57	1,31
3	8,85	1,88	5,51	7,42	1,44	5,35
4	24,49	20,01	22,34	23,38	19,80	23,45
5	8,58	2,77	5,79	8,24	3,22	6,50
6	7,42	40,13	23,11	10,01	40,92	20,71
7/8/9	39,46	30,58	35,20	39,61	30,57	36,47
Total	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

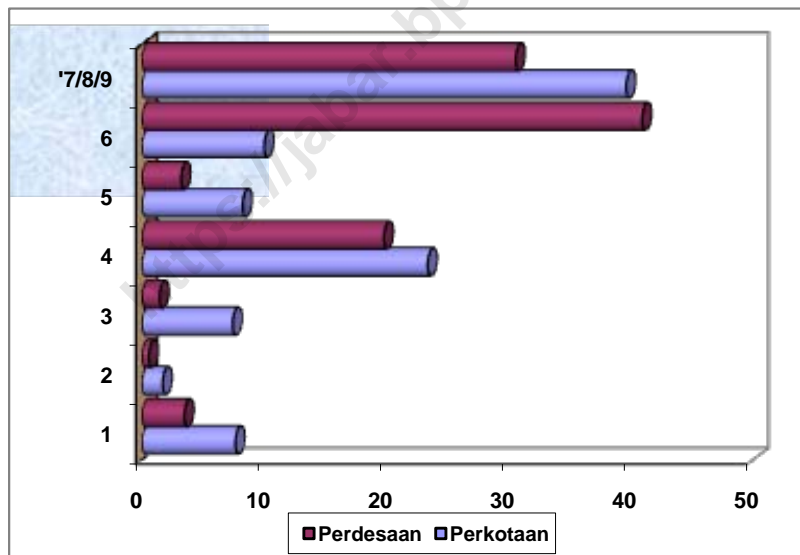
Ket *) Lihat ket. Tabel 4.4.

Karena mayoritas penduduk di wilayah perdesaan di provinsi Jawa Barat berprofesi di kegiatan pertanian, maka sudah bisa dipastikan persentase penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama adalah sebagai tenaga kerja usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan dan perburuan dengan persentase mencapai 40,92. Seperti diketahui bahwa untuk daerah perkotaan kegiatan

ekonomi didominasi oleh sektor perdagangan, industri dan jasa, sehingga persentase penduduk menurut jenis pekerjaan utama terserap di sektor tenaga usaha penjualan dan tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar banyak terdapat diwilayah perkotaan yang masing-masing mencapai 23,38 persen dan 39,61 persen dibanding dengan wilayah perdesaan.

Secara umum tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat menurut jenis pekerjaan didominasi oleh tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar yaitu sebesar 36,47 persen, disusul oleh tenaga usaha penjualan sebesar 23,45 persen, tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan dan perburuan sebesar 20,71 persen terpaut sedikit di urutan ketiga.

Gambar 4.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2011, data diolah

Keterangan *): Lihat ket. Tabel 4.4.

Sebagian besar daerah kabupaten/kota di Jawa Barat didominasi oleh tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar utamanya untuk kabupaten Bandung dan kota Tasikmalaya yang mencapai 50,48 persen dan 54,03 persen.

Tabel 4.6. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Pekerjaan							
		1	2	3	4	5	6	7/8/9/10	
1	Kab. Bogor	5,22	1,08	4,27	22,50	7,81	12,59	46,53	100,00
2	Kab. Sukabumi	3,14	0,92	2,17	21,38	2,81	27,29	42,29	100,00
3	Kab. Cianjur	4,05	0,46	1,52	21,38	5,76	40,17	26,69	100,00
4	Kab. Bandung	4,59	1,87	3,87	15,23	4,00	19,97	50,48	100,00
5	Kab. Garut	4,12	1,18	1,24	21,48	5,67	39,55	26,76	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	4,88	0,30	2,23	17,89	2,74	29,97	41,98	100,00
7	Kab. Ciamis	5,31	-	2,71	25,10	3,78	29,60	33,50	100,00
8	Kab. Kuningan	4,31	0,55	3,79	29,27	3,13	30,89	28,06	100,00
9	Kab. Cirebon	3,93	0,66	2,23	36,70	2,37	31,70	22,42	100,00
10	Kab. Majalengka	4,24	0,87	2,56	19,76	5,08	35,95	31,55	100,00
11	Kab. Sumedang	5,67	0,32	3,61	22,35	6,06	28,95	33,05	100,00
12	Kab. Indramayu	5,45	1,02	2,08	28,32	4,15	38,20	20,78	100,00
13	Kab. Subang	3,51	0,33	1,45	26,17	2,25	37,30	29,00	100,00
14	Kab. Purwakarta	3,61	0,71	2,44	19,08	4,08	22,26	47,82	100,00
15	Kab. Karawang	4,79	0,67	3,12	32,61	6,15	19,18	33,46	100,00
16	Kab. Bekasi	7,43	2,14	6,48	18,63	8,02	11,14	45,82	100,00
17	Kab. Bdg Barat	7,07	0,12	4,09	15,22	9,98	25,76	37,76	100,00
18	Kota Bogor	11,53	4,56	12,31	24,55	14,54	1,09	31,43	100,00
19	Kota Sukabumi	13,50	4,41	11,76	24,20	8,88	3,42	33,83	100,00
20	Kota Bandung	9,52	1,25	10,21	31,74	9,61	0,33	37,33	100,00
21	Kota Cirebon	11,63	1,67	11,28	34,68	12,05	-	28,70	100,00
22	Kota Bekasi	14,75	3,78	20,01	18,16	10,50	0,16	32,65	100,00
23	Kota Depok	9,63	2,71	11,97	26,05	14,66	1,98	33,00	100,00
24	Kota Cimahi	9,41	1,89	11,31	26,94	9,70	1,32	39,46	100,00
25	Kota Tasikmalaya	4,71	1,98	4,72	21,75	4,33	8,49	54,03	100,00
26	Kota Banjar	7,73	0,91	7,53	26,04	6,48	9,73	41,59	100,00
	Jawa Barat	6,21	1,31	5,35	23,45	6,50	20,71	36,47	100,00

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2011, data diolah
Keterangan *): Lihat Tabel 4.4.*

4.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status pekerjaan pada dasarnya terdiri dari empat kategori yang berbeda tentang kelompok penduduk yang bekerja yaitu tenaga kerja yang berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Berusaha sendiri terdiri dari tenaga kerja yang benar-benar berusaha sendiri tanpa dibantu buruh dibayar maupun tidak dibayar, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Pekerja bebas terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Sementara pekerja keluarga juga dikenal sebagai pekerja tak dibayar.

Bila dibandingkan antar waktu, keadaan tahun 2011 sedikit berbeda dengan tahun 2010. Gambaran yang sedikit berbeda itu ditunjukkan oleh status buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2011 yang mengalami kenaikan sebesar 5,74 dari tahun tahun 2010, sedangkan untuk status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan pekerja bebas di non pertanian mengalami penurunan. Kondisi ini mungkin sebagai dampak dari adanya beberapa pengurangan tenaga kerja dari para penduduk yang memiliki usaha sendiri. Hal ini juga di buktikan dengan turunnya status pekerja berusaha sendiri dari 23,11 persen menjadi 20,13 persen pada tahun 2011 ini.

Temuan menarik lainnya adalah adanya perbedaan yang cukup nyata antara laki-laki dan perempuan dalam hal status pekerjaan keluarga atau pekerja tidak di bayar. Pekerja perempuan berstatus sebagai pekerja dibayar/karyawan pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar lebih dari 20 persen sedangkan pekerja laki-laki hanya 2,69 persen saja.. Jika melihat fakta tersebut, tampaknya besarnya TPAK perempuan (41,47%) tidak berarti naiknya jumlah atau persentase pekerja perempuan dengan status pekerjaan yang lebih baik. Hal ini, untuk kasus di Indonesia, tidak bisa ditarik garis lurus karena peningkatan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka. Karena banyak perempuan Indonesia yang

termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah).

Tabel 4.7. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Status Pekerjaan	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	25,28	18,52	23,11	21,64	17,02	20,13
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/burh tidak dibayar	18,26	11,46	16,07	14,29	10,85	13,16
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,71	1,25	2,92	4,05	1,84	3,33
Buruh/karyawan/pegawai	33,82	35,56	34,38	40,24	39,87	40,12
Pekerja bebas di pertanian	7,95	7,34	7,76	7,49	6,78	7,25
Pekerja bebas di non pertanian	8,29	3,00	6,58	8,97	3,29	7,11
Pekerja keluarga/tak dibayar	2,69	22,87	9,19	3,32	20,35	8,90
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Banyaknya pabrik, pertokoan dan swalayan, perusahaan swasta serta instansi pemerintah mengakibatkan lapangan kerja di daerah perkotaan lebih banyak pekerjaan yang menyerap buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2011 penduduk bekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai di daerah perkotaan persentasenya lebih tinggi (49,08 persen). Naik sebesar 1,42 persen dibanding tahun sebelumnya karena adanya penerimaan PNS dan makin berkembangnya kondisi perekonomian di daerah perkotaan. Karena sebagian besar di daerah perdesaan penduduknya adalah petani maka status pekerjaan di daerah perdesaan lebih banyak pada status berusaha sendiri 20,86 persen serta buruh/karyawan/pegawai sebesar 23,22 persen

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal persentase penduduk di daerah perkotaan menurut status pekerjaan rata-rata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hanya penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk daerah perdesaan sebaliknya, yaitu

rata-rata mengalami kenaikan kecuali penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Tabel 4.8. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Status Pekerjaan	2010			2011		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Berusaha sendiri	23,98	22,16	23,11	19,74	20,86	20,13
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11,07	21,49	16,07	11,27	16,74	13,16
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,15	2,66	2,92	3,48	3,03	3,33
Buruh/karyawan/pegawai	47,66	19,97	34,38	49,08	23,22	40,12
Pekerja bebas di pertanian	2,81	13,12	7,76	2,71	15,83	7,25
Pekerja bebas di non pertanian	5,87	7,36	6,58	6,52	8,21	7,11
Pekerja keluarga/tak dibayar	5,47	13,23	9,19	7,20	12,11	8,90
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota, semua daerah kota didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai. Kabupaten yang didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai adalah kabupaten yang memiliki kawasan industri seperti, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, kemudian ada juga yang memiliki industri yang cukup banyak seperti Kabupaten Bandung, sementara Kabupaten Bogor dan Subang karena berdekatan dengan kota besar yaitu Kota Jakarta dan Bandung.

Tabel 4.9. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Kab. Bogor	23,35	13,11	3,45	42,88	4,51	6,38	6,32	100,00
2	Kab. Sukabumi	22,00	20,51	2,00	25,16	9,60	9,35	11,38	100,00
3	Kab. Cianjur	21,97	16,06	4,45	25,09	13,40	7,24	11,79	100,00
4	Kab. Bandung	15,21	10,83	3,38	47,69	7,65	8,08	7,15	100,00
5	Kab. Garut	26,93	14,44	2,02	18,07	14,36	7,43	16,76	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	20,61	17,64	3,04	25,92	8,49	12,32	11,97	100,00
7	Kab. Ciamis	16,87	22,21	3,41	25,13	6,61	7,73	18,04	100,00
8	Kab. Kuningan	18,49	20,87	5,00	28,57	3,83	7,93	15,31	100,00
9	Kab. Cirebon	25,85	11,27	1,85	24,77	12,84	10,54	12,88	100,00
10	Kab. Majalengka	14,93	25,81	2,11	25,83	5,94	10,08	15,31	100,00
11	Kab. Sumedang	20,36	14,18	3,56	31,38	6,35	11,69	12,48	100,00
12	Kab. Indramayu	23,18	14,44	4,81	21,11	18,68	5,38	12,42	100,00
13	Kab. Subang	18,82	21,16	2,80	24,63	16,22	5,97	10,40	100,00
14	Kab. Purwakarta	18,54	16,28	1,49	32,38	7,29	14,30	9,72	100,00
15	Kab. Karawang	21,34	13,30	3,11	35,21	11,86	5,63	9,54	100,00
16	Kab. Bekasi	25,39	7,73	1,77	54,93	4,54	2,64	3,00	100,00
17	Kab. Bdg Barat	13,01	13,77	2,46	42,71	7,64	11,82	8,60	100,00
18	Kota Bogor	18,95	8,33	4,65	60,37	0,53	4,80	2,37	100,00
19	Kota Sukabumi	19,64	7,71	5,05	54,53	0,44	8,58	4,15	100,00
20	Kota Bandung	19,15	5,52	4,50	63,20	0,22	4,27	3,14	100,00
21	Kota Cirebon	20,78	7,42	3,60	58,18	--	4,51	5,51	100,00
22	Kota Bekasi	11,26	4,15	5,28	75,98	--	1,80	1,53	100,00
23	Kota Depok	18,07	6,02	4,09	62,79	-	4,12	4,91	100,00
24	Kota Cimahi	19,10	4,06	3,53	64,85	0,28	5,16	3,02	100,00
25	Kota Tasikmalaya	17,94	16,41	3,34	39,11	3,28	13,16	6,76	100,00
26	Kota Banjar	22,60	13,44	4,69	41,30	2,27	6,87	8,83	100,00
	Jawa Barat	20,13	13,16	3,33	40,12	7,25	7,11	8,90	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

*) Data tidak tersedia

BAB 5

PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL

Pengelompokkan definisi formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal contohnya adalah pedagang kaki lima (PKL), becak, peñata parkir, pengamen, dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya. Sedangkan pekerja sektor formal terdiri dari tenaga professional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa.

Sektor informal seringkali dipandang sebelah mata dalam kebijakan pembangunana di Indonesia. Bahkan sektor ini seringkali dianggap sebagai akibat adanyadualisme ekonomi yang terjadi di Indonesia (lihat Boeke, 1953). Selain itu, sektor informal juga disebut sebagai potret kegagalan proses transformasi struktur ekonomi diIndonesia dari pertanian menjadi industri (Kuncoro, 2000)

Peran sektor informal kota sangat strategis sebagai katup pengaman pengangguran. Di berbagai kota besar, ketika situasi krisis melanda Indonesia dan pengangguran terjadi di mana-mana, maka peluang satu-satunya yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup jutaan korban PHK dan pengangguran dari desa adalah sektor informal.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Formal dan Informal) dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

No.	Status Pekerjaan	2010			2011		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Formal	47,43	47,47	47,44	52,30	51,47	52,03
2.	Informal	52,57	52,53	52,56	47,70	48,53	47,97
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peranan sektor formal sampai Agustus 2011 mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi 52,30 persen pekerja laki-laki dan 51,47 persen pekerja perempuan berbeda dengan keadaan tahun 2010 lalu dimana sektor informal masih memegang peranan dengan 52,57 persen pekerja laki-laki dan 52,53 persen pekerja perempuan. Ini berarti perekonomian di Jawa Barat semakin berkembang dan maju. Gambaran perkembangan sektor sektor formal-informal juga dapat menjadi sinyal perekonomian daerah.

Tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan dan ketrampilan memadai di perkotaan menjadi kendala pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan. Mereka yang pada mulanya berkeinginan bekerja di sektor formal pada akhirnya bermuara di sektor informal. Wilayah perdesaan sebagai sarang sektor informal. Dari seluruh pekerja di perdesaan, lebih dari 66 persen bekerja di sektor informal, sementara di perkotaan, dari 100 pekerja, lebih dari 38 bekerja di sektor informal.

Jika dilihat perwilayah kota dan desa maka pekerja sektor formal di perkotaan pada tahun 2011 ini mencapai 40,45 persen sedangkan di perdesaan hanya 11,07 persen. Sedangkan untuk pekerja sektor informal keadaan tahun 2011 ini jauh berbeda dengan keadaan tahun 2010 yang lalu. Jika pada tahun

2010 lalu pekerja sektor formal di perkotaan hanya 19,83 persen, maka pada tahun ini naik menjadi 24,91 persen berbanding terbalik untuk wilayah pedesaan dari 32,73 persen turun menjadi 23,07 persen.

Salah satu penyebab turunnya tenaga kerja informal di pedesaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan sementara tenaga kerjanya berlebihan maka mereka bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan agar untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup.

Meningkatnya sektor formal terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pekerja sektor formal yang berpendidikan tdk/blm tamat SD, SD dan SLTP yaitu dari 6,82 persen menjadi 7,42 persen untuk tdk/blm tamat SD, 23,46 persen menjadi 24,03 persen untuk SD dan 19,50 persen menjadi 20,31 persen untuk SLTP (tabel 8.3.3). Sedangkan jumlah pekerja sektor informal untuk pekerja yang berpendidikan rendah yaitu mereka yang setinggi-tingginya tamat SD/MI terjadi sedikit penurunan yaitu dari 48,12 persen menjadi 47,53 persen di tahun 2011.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Formal dan Informal) dan Tingkat Pendidikan di Jawa Barat Tahun 2010-2011

No.	Tingkat Pendidikan	2010		2011	
		Formal	Informal	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tidak/blm pernahsekolah	0,80	3,45	1,05	5,00
2.	Tdk/blm tamat SD	6,82	18,28	7,42	20,41
3.	SD	23,46	48,12	24,03	47,53
4.	SLTP	19,50	17,22	20,31	15,78
5.	SLTA	33,85	12,02	33,52	10,52
6.	Diploma/I/II/III/Akademi/ Universitas	15,57	0,91	13,67	0,77
Total		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Sakernas 2010-2011, data diolah

Dari tabel 5.2. di atas terlihat bahwa sektor informal sebagian besar di kuasai oleh pekerja yang berpendidikan SD/MI (20,41%). Sedangkan sektor formal paling dominan untuk yang berpendidikan SLTA (33,52%). Keadaan ini mencerminkan semakin sulitnya tingkat persaingan mencari pekerjaan, khususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat cukup besar dan rumit. Hal ini karena menyangkut hajat hidup penduduknya yang besar serta berkaitan dengan berbagai faktor sehingga dinamikanya seringkali sulit dipahami.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disarikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Barat berdasarkan Sakernas bulan Agustus tahun 2011 adalah sebanyak 19.356.624 orang, bertambah 462.789 orang atau tumbuh sebesar 2,45 persen dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010. Di antara Angkatan Kerja tersebut, penduduk yang bekerja tercatat 17.454.781 orang, bertambah 512.337 orang atau meningkat 3,02 persen terhadap keadaan pada tahun 2010. Hal yang cukup menarik adalah kenyataan bahwa pada kurun waktu tahun 2010-2011 laju pertumbuhan penduduk perempuan yang bekerja jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk laki-laki yang bekerja, yakni 4,77 persen dibandingkan dengan 2,19 persen.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 62,27 persen, yang berarti bahwa lebih dari 60 persen penduduk Jawa Barat yang berada pada usia kerja telah siap secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, baik yang sudah aktif bekerja, maupun yang saat ini sementara tidak bekerja karena sesuatu hal, dan yang sedang mencari pekerjaan.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 9,83 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT pada

tahun 2010 yang sebesar 10,33 persen. Jika ditinjau dari status wilayah (perkotaan/perdesaan), hasil Sakernas tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa TPT di wilayah perkotaan selalu lebih besar daripada TPT di wilayah perdesaan. Jika dibedakan menurut tingkat pendidikan, TPT untuk penduduk dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas lebih tinggi daripada TPT untuk yang jenjang pendidikannya SLTP ke bawah.

4. Di antara penduduk Jawa Barat yang bekerja pada tahun 2011, 23,91 persen penduduk merupakan pekerja tak penuh, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Kabupaten/kota dengan persentase pekerja tak penuh lebih dari 35 persen adalah Kabupaten Garut (37,60 persen), Kabupaten Tasikmalaya (38,61 persen) dan Kabupaten Cianjur (42,38 persen). Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010, tidak terlihat perubahan nyata perbandingan pekerja tak penuh menurut jenis kelamin namun tampak ada pergeseran persentase pekerja tak penuh jika ditinjau dari status wilayah. Pada tahun 2011 persentase pekerja tak penuh di perkotaan (17,30 persen) sedikit meningkat daripada pekerja tak penuh di perkotaan pada tahun 2010 (14,70 persen), namun pekerja tak penuh di perdesaan pada tahun 2011 (19,28 persen) menyusut cukup nyata dibandingkan tahun 2010 (33,61 persen).
5. Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja di Jawa Barat terbanyak diserap di lapangan usaha perdagangan (26,09 persen), kemudian berikutnya pertanian (21,06 persen), industri (20,47 persen) serta masing-masing 15,46 persen di lapangan usaha jasa kemasyarakatan dan lainnya (meliputi lapangan usaha pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air; konstruksi; transportasi dan komunikasi; lembaga keuangan). Komposisi menurut lapangan usaha ini tidak jauh berbeda dengan komposisi pada tahun 2010.

6. Berdasarkan status pekerjaan, persentase penduduk Jawa Barat yang bekerja pada tahun 2011 terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 40,12 persen, sedangkan yang paling sedikit dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (3,33 persen). Hasil Sakernas tahun 2011 dan 2010 juga memperlihatkan banyaknya jumlah pekerja perempuan sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Dari seluruh pekerja perempuan, yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar ini mencakup 20,35 persennya, menempati peringkat ke dua setelah yang berstatus buruh/karyawan/pegawai (meliputi 39,87 persen).
7. Terjadi kecenderungan pergeseran kriteria pekerjaan dari informal ke formal. Hal ini diperlihatkan dengan persentase penduduk bekerja di sektor formal dari 47,44 persen pada tahun 2010 menjadi 52,03 persen pada tahun 2011, sedangkan persentase penduduk bekerja di sektor informal dari 52,56 persen pada tahun 2010 menjadi 47,97 persen pada tahun 2011. Pergeseran ini terjadi pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, sektor pekerjaan formal terbanyak dikuasai oleh pekerja berpendidikan SLTA, sedangkan pekerjaan informal didominasi oleh pekerja berpendidikan SD.

7.2 Saran

Masalah ketenagakerjaan bersifat multidimensional, terdapat keterkaitan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Dengan demikian, pembinaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan juga tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan kebijakan tunggal, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat sendiri, antara lain melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan seterusnya.

Berlandaskan pada kesimpulan yang telah disebutkan, beberapa hal yang mungkin dapat menjadi masukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur pendidikan yang mendukung penyediaan fasilitas pendidikan dengan biaya terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, kualitas angkatan kerja yang baik juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
2. Dibutuhkan lembaga-lembaga pelatihan dengan kurikulum pelatihan berorientasi pada dunia kerja serta mengacu pada kebutuhan spesifikasi dan kualifikasi berdasarkan lapangan usaha yang menjadi prioritas pada waktu tertentu.
3. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong investor-investor dalam/luar negeri dengan efisiensi dan pelayanan profesional dalam proses perizinan; adanya kepastian hukum bagi dunia usaha; kemudahan akses bagi usaha kecil/menengah kepada berbagai sumber daya dan informasi; peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan di seluruh wilayah; dan sebagainya.
4. Diperlukan kebijakan khusus untuk perluasan kesempatan kerja bagi kaum muda terdidik, penyandang disabilitas, kelompok miskin atau tertinggal atau wilayah terpencil karena semua warga mempunyai hak yang sama untuk penghidupan yang layak.
5. Perlu dukungan berbagai pihak terkait untuk semakin berkembangnya kewirausahaan karena hal ini akan menciptakan banyak kesempatan kerja baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
6. Untuk jangka panjang, pengendalian jumlah angkatan kerja dapat dicapai melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2009, *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009*, Bandung, BPS Jawa Barat .
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010*, Bandung, BPS Jawa Barat .
- Badan Pusat Statistik, 2011, *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011*, Bandung, BPS Jawa Barat .
- BI, 2011, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2011* didownload tanggal 20 September 2011 dari www.bi.go.id.
- Republika, 2011, *Jakarta Paling Kondusif untuk Bekerja*, Artikel tanggal 20 Juli 2011, Didownload tanggal 23 Agustus 2011 dari www.Republika.co.id.
- Sugiarto. Dinamika Struktur Ketenagakerjaan di Perdesaan. Didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://ebookbrowse.com>
- Uzair Suhaimi, 2012. Tren Terkini Ketenagakerjaan Indonesia. Artikel tanggal 29 April 2012, didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://uzairsuhaimi.wordpress.com>.
- Uzair Suhaimi, 2010. Tingkat Kemakmuran dan Keadilan Masyarakat Indonesia: Perbandingan Antar Provinsi. Artikel tanggal 8 April 2010, didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://uzairsuhaimi.wordpress.com>.
- Uzair Suhaimi, 2010. Beberapa Isu Terkait Kemiskinan: Analisis Data Awal Susenas 2004-2008. Artikel tanggal 14 April 2010, didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://uzairsuhaimi.wordpress.com>.
- Uzair Suhaimi, 2009. Beberapa Fakta Mengenai Kesenjangan Taraf Kesejahteraan Penduduk Antar Wilayah dan Antar Strata Ekonomi. Artikel tanggal 13 Nopember 2009, didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://uzairsuhaimi.wordpress.com>.
- Bappenas. Studi Profil Pekerja di Sektor informal dan Arah Kebijakan Ke Depan. Artikel didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://old.bappenas.go.id>
- Lembaga Penelitian Smeru, 2011. Kondisi Tenaga Kerja Muda Sektor Industri di Perkotaan Terkait Dampak Krisis Keuangan Global 2008/2009. Artikel Desember 2011, didownload tanggal 25 Juli 2012 dari www.smeru.or.id

Siregar, Hermanto dan Tatan Sukwika. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor. Didownload tanggal 25 Juli 2012 dari <http://ejournal.unud.ac.id>

<https://jabar.bps.go.id>

Data Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124,
Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595;
+62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572,
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id